LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

TAHUN 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER

Jln. Noto Sunardi (Komplek Perkantoran Bupati Paser)
Telp (0543) – 22696, 21072 I Website : bkd.paserkab.go.id
Email : bkpp.paserkab@gmail.com / bkdpaser@gmail.com
Tana Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

LKjIP ini kami sajikan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. LKjIP pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik guna perbaikan di masa yang akan datang.

Tana Paser, Januari 2021

Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Paser

Drs. Suwito
Pembina Tk. I
NIP. 19650808 1992031019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2020 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari BKPSDM Kabupaten Paser selama satu tahun melalui analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Paser mengalami peningkatan baik dari segi pelayanan dasar tugas pokok, kemampuan SDM aparatur dan tekhnologi aplikasi sistem informasi penilaian kinerja memperlihatkan hasilnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut untuk mencapai sasaran Kabupaten yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi maka hasil penyelarasan indikator, BKPSDM memiliki indikator sasaran yaitu :

- Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN
- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
- Mewujudkan tata kelola informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BKPSDM dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI..... iv
DAFTAR TABEL..... v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Struktur Organisasi..... 3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 5
1.4. Sumber Daya Manusia BKPSDM 5
1.5. Sarana dan Prasarana 8
1.6. Isu-Isu Strategis..... 11
1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis..... 15
2.2. Indikator Kinerja Utama 23
2.3. Rencana Kinerja tahunan (RKT)..... 24
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2020 26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 31
3.2. Realisasi Anggaran 53
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN
1. Form Perjanjian Kinerja
2. Form Pengukuran Kinerja
3. Form Rencana Aksi
4. Form Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan
5. Daftar Penghargaan yang diraih
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja
7. Pedoman Pengumpulan Data Kinerja
8. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan..... 8

Tabel 1.3. Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser..... 9

Tabel 2.1. Sasaran Srategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser..... 21

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama 23

Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020..... 25

Tabel 2.4. Target Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020..... 27

Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja..... 31

Tabel 3.2. Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2020..... 31

Tabel 3.3. Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Kerja RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 32

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Indikator Persentase ASN yang Berpendidikan S1, S2 dan S3 35

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Indikator ASN yang telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal..... 35

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Jumlah Aparatur sesuai Kebutuhan 36

Tabel 3.7. Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Meningkakan Kualitas Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN 37

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Sasaran Meingkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat..... 38

Tabel 3.9. Persentase Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu Tahun 2019-2020 39

Tabel 3.10.Pengukuran Kinerja Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Informasi Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat 40

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Record Data yang Diupdate.... 40

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase SKPD yang Melaporkan Data Kepegawaian 41

Tabel 3.13.Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2020 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser 42

Tabel 3.14 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 43

Tabel 3.15 Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020..... 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser 4
Gambar 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 75
Gambar 3. Seleksi CPNS Formasi tahun 2019 50
Gambar 4. Pembukaan Kegiatan Ujian Dinas Tahun 2020 50
Gambar 5. Pengambulan Sumpah 167 CPNS di ruang Rapat Sadurengas oleh Wakil Bupati Paser, Kaharuddin..... 51

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 berisi :

1. *Latar Belakang*
2. *Struktur Organisasi*
3. *Tugas dan Fungsi*
4. *Sumber Daya Manusia BKPSDM*
5. *Sarana dan Prasarana*
6. *Isu-Isu Strategis*

1.1. Latar Belakang

Perjuangan untuk melakukan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh - sungguh akan mewujudkan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pada pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi *asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan akuntabilitas.*

Asas akuntabilitas adalah asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Untuk menjabarkan **Asas Akuntabilitas** tersebut, Pemerintah menerbitkan **Inpres Nomor 7 Tahun 1999** tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian prinsip dasar Inpres tersebut diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 dan Nomor 108 Tahun 2002 yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, pemerintah membuat pedoman SAKIP berupa modul-modul SAKIP dan membuat Pedoman Penyusunan LKjIP berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dalam pedoman tersebut diatur bahwa SAKIP terdiri dari 4 Komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pada Tahun 2014, dilakukan penyempurnaan terhadap Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam Permen ini diuraikan bahwa Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercaya kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehubungan dengan komponen yang keempat dari SAKIP, yaitu pelaporan kinerja, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
2. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang sebelumnya bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2016. Seiring perubahan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Paser juga mengalami perubahan struktur dan penambahan subbidang di masing-masing bidang.

Susunan organisasi berdasarkan struktur yakni sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahkan :
   1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
   2. Sub bagian perencanaan dan keuangan
c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, yang membawahi :
   1. Sub bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
   2. Sub bidang Data dan Informasi Kepegawaian
d. Bidang Pengembangan dan Mutasi, yang membawahi :
   1. Sub bidang Pengembangan dan Diklat

2. Sub bidang Mutasi dan Kepangkatan

e. Bidang Penilaian dan Kesejahteraan ASN, membawahi :

1. Sub bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Sub bidang Disiplin dan Penghargaan
3. Sub bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut struktur organisasi setelah perubahan peraturan Bupati Paser nomor 29 tahun 2020 :

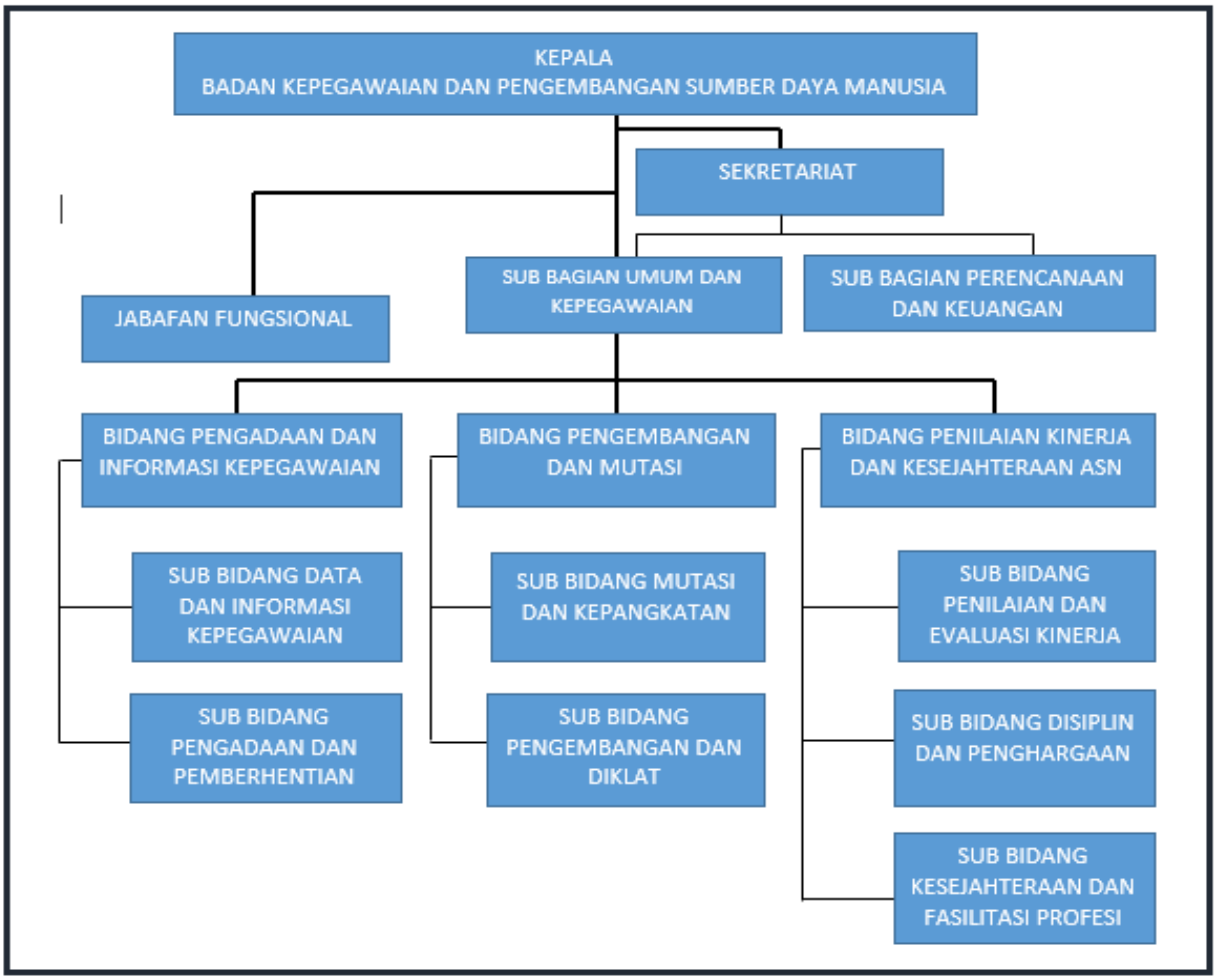

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser nomor 29 Tahun 2020 melaksanakan urusan pemerintahan yang berekdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BKPSDM menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
f. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan BKPSDM;dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sumber Daya Manusia BKPSDM

Potensi sumber daya manusia lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sampai dengan tanggal 31

Desember 2020 berjumlah 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Golongan
   - Golongan I : -
   - Golongan II : 3 orang
   - Golongan III : 27 orang
   - Golongan IV : 4 orang
2. Jabatan Struktural
   - Eselon II : 1 orang
   - Eselon III : 4 orang
   - Eselon IV : 9 orang
   - Non eselon : 20 orang
3. Tingkat Pendidikan
   - SLTP : -
   - SLTA : 5 orang
   - Diploma III : 2 orang
   - Strata 1 : 24 orang
   - Strata 2 : 3 orang
   - Strata 3 : -

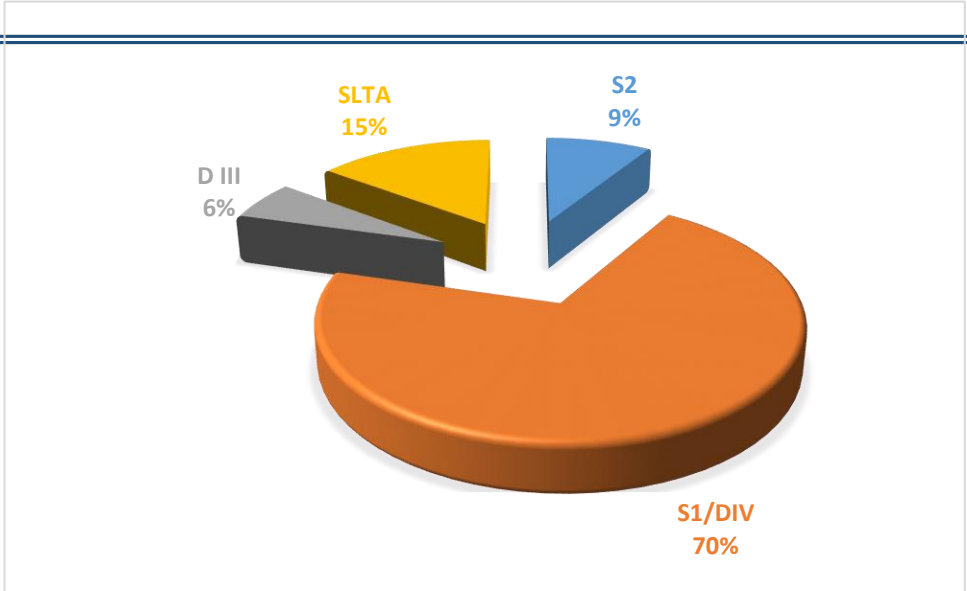

Gambar 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan								Jlh
		S3	S2	S1/D4	D3	D2/D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Laki-Laki	-	2	14	2	-	3	-	-	21
2	Perempuan	-	1	10	-	-	2	-	-	13
%		-	8.8	70.5	5.8	-	20.8	-	-	34

Sumber : BKPSDM Kab. Paser, Januari 2021

Dilhat berdasarkan jumlah pegawai, berdasarkan analisa kebutuhan pegawai di Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten paser setidaknya memerlukan 7 orang ASN dengan pendidikan D3 dan SLTA, karena beberapa pelaksana khususnya untuk jabatan pengadministrasi dan pengelola masih ada yang kurang, namun keadaan ini dapat tertutupi dengan bantuan pegawai PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Adapun rekapitulasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		PNS	PTT
1.	Pejabat Eselon II B	1	
2.	Pejabat Eselon III A	1	
3.	Pejabat Eselon III B	3	
4.	Pejabat Eselon IV A	9	
5.	Analis Kesejahteraan SDM Aparatur	1	
6.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	
7.	Analis Kepegawaian Muda	1	
8.	Analis Data dan Informasi	1	
9.	Analis Kinerja	1	
10.	Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	1	
11.	Penyusun Rencana Mutasi	1	
12.	Penyusun Rencana Promosi	1	
13.	Bendahara	1	
14.	Pengelola Kepegawaian	1	
15.	Pengelola Keuangan		-
16.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	1	
17.	Pengelola Dokumen	1	
18.	Pengelola Data	1	
19.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	
20	Pengelola Data Penilaian Kinerja Pegawai	-	-
21.	Pengelola Profesi SDM	1	
22.	Pengolah Daftar Gaji	1	
23.	Pengadministrasi Umum	3	
24.	Supir		1
25.	Petugas Kebersihan		1
26.	Staf Pelaksana		9
	Jumlah	34	11

Sumber : BKPSDM Kab. Paser Januari 2021

1.5. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Perlengkapan)

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan yang menunjang berlangsungnya proses pelayanan tersebut. Berkaitan hal tersebut, hingga saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser masih belum memiliki gedung/kantor, sehingga dalam menjalankan aktifitas pelayanan kepegawaian masih bertempat di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Sedangkan sarana

penunjang yang berupa peralatan (asset) yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Asset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser

Jenis / Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Tanah	0			
Gedung	1			
Konstruksi dalam Pengerjaan	1			
Peralatan dan Mesin	648			
Alat - Alat Angkutan :	7			
- Staion Wagon	2	2		
- Kendaraan Dinas Bermotor lain-ain	3	2	1	
- Sepeda Motor	2	2		
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1			
- Perkakas bengkel servise lain-lain	1	1		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	570			
- Mesin ketik Manual Standar (14-16)	2		2	
- Lemari besi	41	41		
- Rak kayu	5	5		
- Filling besi/metal	3	3		
- Filling kayu	10	6	4	
- Lemari kaca	8	4	4	
- Papan nama instansi	1		1	
- Papan pengumuman	1	1		
- White board	2	2		
- Alat kantor lainnya (lain-lain)	2	2		
- Meja tambahan	11	11		
- Kursi tamu	2	2		
- Kursi putar	105	105		
- Kursi biasa	28	24		
- Kursi lipat	45	45	4	
- Meja komputer	71	71		
- Sofa	6	6		
- Kursi plastic	9			
- AC split	18	18	9	
- Televisi	1			
- Wireless	1	1	1	
- Camera Video	1	1		
- Camera Film	5	5		
- PC unit3	85	83		
- Note book	23	21	2	

- Hard Disk - Monitor - Printer - Scanner - Server - Peralatan Jaringan lain-lain - Meja kerja pejabat eselon II - Meja kerja pejabat eselon III - Kursi kerja pejabat eselon II - Kursi kerja pejabat eselon III - Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon II - Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon III - Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II - Kursin Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III - Lemari arsip untuk arsip dinamis - Buffet kayu	1 3 26 2 1 3 1 4 2 3 2 3 1 4 26 2	1 3 26 2 1 3 1 4 2 3 2 3 1 4 26 2	2	
Alat Studio dan Alat Komunikasi - Proyektor + Attachment - Microphone/wireless Mic - Unintemuptible Power Supply (UPS) - Sound System - Pesawat telephone - Faximile - Wireless Amplifier	19 3 1 9 2 1 2 1	 3 1 9 2 1 2 		
Alat Laboratorium - Dial Gauge LC : 13 - Meja kerja	43 1 42	 1 38	 4	
Alat-alat Persenjataan/Keamanan - Penyembur api	1 1		 1	
Instalasi Pusat Pengatur Listrik lain-lain	2	2		
Buku Umum lain-lain - Ekonomi - Hukum - Administrasi, Pertahanan dan Keamanan - Buku Ilmu Sosial lain-lain	13 3 6 3 1	 3 6 3 1		

Sumber : BKPSDM Kab. Paser Januari 2021

Lokasi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang masih berada dalam lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sudah sangat strategis, namun jika dibandingkan dengan kebutuhan kerja dan tuntutan tugas dan fungsi BKPSDM sendiri lokasi kantor sekarang dianggap kurang mencukupi. Dengan tingginya angka kebutuhan untuk peningkatan kompetensi ASN, maka BKPSDM membutuhkan sarana assessment center yang memadai, dengan adanya fasilitas assesmen center yang cukup maka diharapkan kebutuhan akan diklat, pendidikan atau pelatihan akan sedikit dapat terpenuhi melalui ketersediaan lembaga kompetensi sendiri.

1.6. Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis organisasi, berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling terkait (berinteraksi) dalam proses penyelesaian dan penyelenggaraan pembangunan.

Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Paser antara lain :

1. Komitmen Gubernur Kalimantan Timur dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
2. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Paser;

3. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
4. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung *interlink* pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan instansi-instansi terkait;
5. Pengembangan sistem *reward* dan *punishment* melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
6. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan *civil society*; Kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur belum memadai seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kurangnya penyerapan inovasi, kreativitas pola pikir holistik terkait dengan peningkatan kompetensinya;
7. Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki belum memadai;
8. Koordinasi lintas sektoral tentang dasar hukum beberapa ketentuan yang saling berhubungan antar instansi namun belum terdapat singkronisasi sehingga seringkali menjadi kendala kurangnya kinerja BKPSDM;
9. Peraturan dari pemerintah yang sering berubah-rubah.

1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah sebagai Berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB. I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai

sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2020*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1. Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2016-2021 telah mengalami perubahan, evaluasi pembangunan ini dilakukan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2016-2021 telah mengalami perubahan, evaluasi pembangunan ini dilakukan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Perubahan ini dilakukan disebabkan karena adanya beberapa indikator seperti perubahan indikator sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan RPJMD, perubahan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2016-2021 menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser yang kemudian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana diputuskan dalam Peraturan Bupati Paser nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser nomor. 700/09.1/Sek.II/BKPSDM tanggal 23 Januari 2020. Hasil perubahan RPJMD ini digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yaitu :

" Terwujudnya Kabupaten paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"

Maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yaitu :

"Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berdaya Saing"

(1) Sumber Daya Apatur

Adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material/non financial yang bertugas memberikan pelayanan.

(2) Professional

Adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dengan dedikasi tinggi, berorientasi

pada prestasi kerja, menekuni dan menguasai bidang tugas masing-masing serta memegah teguh akuntabilitas dan transparansi.

(3) Berdaya Saing

Adalah kemampuan aparatur dalam menghasilkan produk berupa jasa atau pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan, dan dalam saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara konsisten dan berkelanjutan dnegan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi

   Kompetensi ASN berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang dimanatkan kepadanya.

   Setiap ASN harus memiliki kompetensi sehingga tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik, mampu melaksanakan kepemerintahan yang baik (*good dovernance*), cepat berubah menyesuaikan perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi, mampu menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak dapat di tolak dan dicegah lagi.

2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian

   Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan yang meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah program dan kegiatan dalam melaksanakan misi yang dicanangkan untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser , maka tujuan yang ingin dicapai dakam jangka menengah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan sesuai dengan Kompetisinya

   Dalam hal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam mewujudkan cita-cita serta amanat dalam undang-undang tersebut dapat menuangkan dengan program-program yang disusun yang terencana sehingga dapat membentuk mencetak PNS (ASN) yang professional, jujur, adil danmerata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

2. Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang Prima

   Untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu melakukan inovasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada beberapa produk layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

3. Mewujudkan Tata Kelola Informasi Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat

   Pada setiap penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan untuk menuju good governance, konsep good governance ini memerlukan sistem yang mengakomodir

kebutuhan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit – belit dengan menggunakan sistem informasi dimungkunkan adanya otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sistem pengolahan data berbasis komputer (DBC) yang diharapkan mampu membantu tugas dan pekerjaan operasional pada Level Administratif serta menyediakan informasi yang mendukung setiap pengambilan keputusan pada Level Manajerial, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yaitu dalam pelayanan, pengawasan dan pengendalian administrasi yaitu tersedianya data base yang up to date, meningkatkan efesiensi dan efektifitas (menghilangkan duplikasi data, meminimalisasi simpul irakrasi, Meningkatkan Standarisasi Proses, Desentralisasi Kewenangan, Meningkatkan Pelayanan dan kemudahan bagi PNS, Meminimalisir kesenjangan SDM berupa pengetahuan dalam pengelolaan data kepegawaian.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Sasaran strategis yang dirumuskan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN

   Dalam sasaran strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu :

   a. Persentase pegawai negeri sipil yang mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak PNS yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

   b. Persentase PNS yang mengikuti dan lulus diklat teknis tugas dan fungsi

      Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia mengharapkan agar PNS d ilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan memiliki daya saing.

c. Persentase Penurunan Pelanggaran Hukuman Disiplin dan etika pegawai. Melalui indikator utama ini untuk mengukur tingkat disiplin dan kepatuhan PNS dalam melaksanakan aturan kepegawaian yang berlaku.

d. Persentase pengadaan pegawai pada SKPD sesuai formasi.

   Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur jumlah pengadaan PNS sesuai kebutuhan dan formasi.

e. Persentase penetapan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

f. Persentase Pejabat struktural yang telah mengikuti asesment test.

   Indikator ini ditetapkan untuk mengetahui persentase pejabat struktural yang telah mengikuti asesment test.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator kinerja utama yakni :

a. Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan BKPP Kabupaten Paser apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. melalui sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengharapkan agar seluruh pegawai baik PNS maupun PTT yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memberikan pelayanan kepegawaian sesuai dengan harapan PNS atau instansi yang dilayani.

b. Persentase Tata Naskah Pegawai yang dikelola sesuai NIP.

Indikator utama ini ditetapkan untuk mengetahui seberapa banyak tata naskah PNS yang telah tersedia, dikelola dan up to date. Melalui sasaran strategis ini diharapkan agar data dan informasi kepegawaian dikelola berbasis teknologi dan informasi (IT) serta akurasi database dan tata naskah dapat terwujud.

3. Meningkatkan kualitas sistem informasi kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian adalah suatu Sistem Informasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengatasi masalah management kepegawaian. Pengelolaan data kepegawaian merupakan suatu proses vital dan strategis yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan akan informasi adata yang cepat, tepat, akuntabel dan up to date. Ada 2 (dua) indikator sasaran ini yakni :

1. Persentase record data yang diupdate
2. Persetase SKPD yang melaporkan data kepegawaian

Tabel 2.1. Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	47.02	50.86	51.49	51.15	51.46
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	NA	3.69	6.24	8.17	10
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	NA	100	60	100	66.67
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan ASN	A	A	A	A	A

	Administrasi Kepegawaian						
3.	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record data yang diupdate	100	100	100	100	100
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawaian	100	100	100	100	100

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Menyusun Standar Pelayanan Kepegawaian
3. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian berbasis IT

Kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan Program/kegiatan. Berikut adalah kebijakan umum BKPSDM dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pengembangan ASN berbasis kompetensi
2. Menerapkan Standar Pelayanan Kepegawaian
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kepegawaian
4. Melakukan Pelayanan yang Cepat dan Akurat
5. Perencanaan Kepegawaian Berdasarkan Kebutuhan Riil
6. Pelaksanaan Pengisian, Mutasi dan promosi Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi, Latar Belakang Pendidikan dan Kebutuhan Instansi
7. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian agar Menghasilkan Database Kepegawaian yang Lengkap, Akurat dan Terkini
8. Pengelolaan Tata Naskah dan Dokumentasi Data Kepegawaian Berbasis IT.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BKPSDM Kabupaten Paser menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah pelayanan adm. Kepegwaian yang selesai tepat waktu / Jumlah usulan kepengurusan adm. Kepegawaian	Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan dan Mutasi, Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN	- Data pelayanan pangkat pegawai - Data pelayanan berkala pegawai - Data mutasi pegawai - Data cuti pegawai - Data pension - Data pension duda/janda - Data usulan tugas belajar & ijin belajar - Data diklat - Data pembuatan kartu pegawai Data karis/karsu
2.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang lulus mengikuti diklat sesuai dengan	Jumlah lulusan diklat yang sesuai kompetensi / Jumlah seluruh PNS yang mengikuti diklat	Bidang Pengembangan dan Mutasi	Rekapitulasi pejabat eselon yang mengikuti DIklat structural, fungsional dan teknis

		kompetensinya			
		Persentase Penurunan Pelanggaran hukuman disiplin an etika pegawai	Persentase pegawai yang membuat SKP dengan benar	Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Rekap input SKP
			Jumah pelanggaran disiplin PNS pada tahun berjalan / Jumlah pelanggaran tahun lalu		Rekap kehadiran pegawai seluruh Kabupaten
		Persentase pengadaan pegawai sesuai Formasi	Jumlah CPNS yang sesuai dengan kebutuhan dibandingkan dengan jumlah usulan formasi x 100	Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	Rencana Kebutuhan Pegawai dan Daftar peserta lulus seleksi CPNS
	Meningkatnya kualitas data dan infromasi kepegawaian daerah di Kabupaten Paser	Persentase Record Data Pegawai yang di Update	Jumlah database pegawai yang terupdate dibandingkan PNS x 100	Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	Data base kepegawaian SAPK
		Persentase Tata Naskah Dinas Pegawai yang di kelola sesuai NIP	Jumlah Tata naskah Pegaai yang dikelola sesuai NIP dibandingkan jumlah PNS x 100	Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	Data layanan penggantian Kartu Pegawai

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 dibuat berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target pencapaiannya yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021. RKT ini memuat kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Paser dan indikator kinerja beserta target-

targetnya berdasarkan program, kebijakan dan assaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target kinerja tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk indikator-indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi BKPSDM Kabupaten Paser untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Melalui Rencana Kinerja Tahun ini kemudian setiap organisasi dapat menyusun Perjanjian Kinerjanya yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpnan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	51.15 %
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8.17 %
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	100 %
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record Data yang Diupdate	100
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawainnya	100

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 301.451.600,-	APBD

2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp. 96.569.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 97.959.400,-	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 66.840.627,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 1.495.000,-	APBD
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.071.299.700,-	APBD
7.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 5.438.800,-	APBD
8.	Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.544.014.510,-	APBD
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 2.979.158.230,-	APBD
10.	Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI	Rp. 121.420.000,-	APBD

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2020

a. Target dan Capaian Anggaran Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 16.627.170.000,- kemudian melalui mekanisme perubahan dan recofussing anggaran menjadi Rp. 10.724.646.867,00 dengan realisasi sebesar 81.23 atau Rp. 10.724.646.867,-. Adapun perbandingan target dan capaian serapan anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4. Target Belanja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Porsentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.439.000.000,-	3.854.255.624,-	86.83
2.	Belanja Langsung	6.285646.867,-	4.857.100.865,-	77.27
	Jumlah	10.724.646.867,-	8.711.356.489,-	81.23

b. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengembangkan beberapa kegiatan dan aplikasi SIMANDIRI (Sistem Informasi Manajemen ASN Mandiri), sebagaimana Surat Edaran Bupati Paser nomor 863/570/Bid.III.1/BKPP tentang Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Penilaian Kinerja ASN (SIAPKERJA), Sistem Informasi Cuti ASN Berbasis Elektrnoik (SICABE) dan Eleketronik Kenaikan Gaji Berkala (E-KGB).

1. Aplikasi SIAPKERJA

   Penggunaan e-SKP adalah seluruh {egawai Negeri Sipil di mulai dari struktur tertinggi instansi sebagai level tertinggi sampai pada staf sebagai level terbawah. Penilaian kinerja yang diterapkan di Kabupaten Paser nantinya akan dijadikan dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

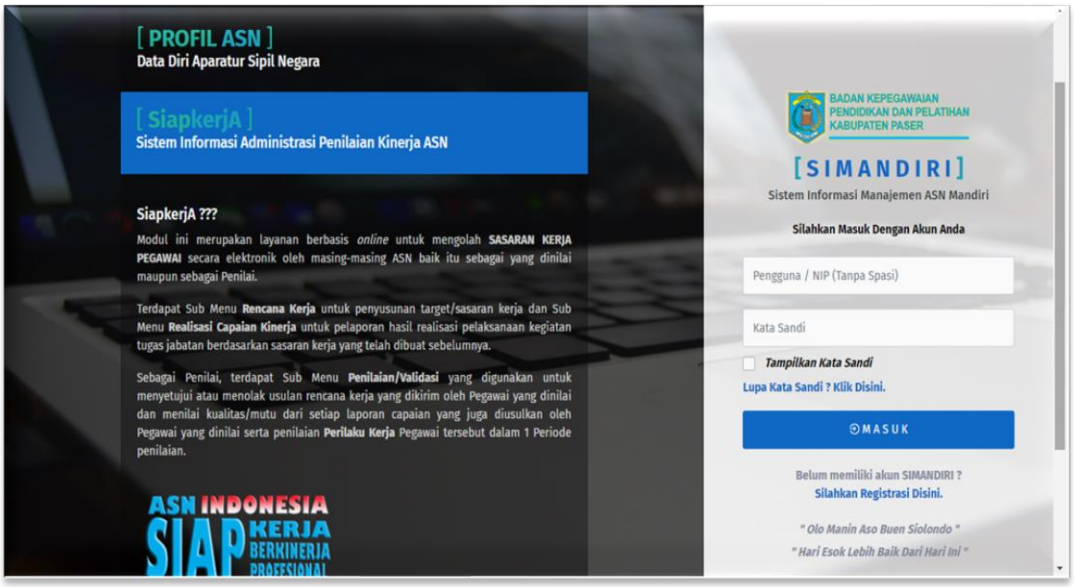

2. SICABE

   Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan pembuatan usulan Cuti Tahunan

3. E-KGB

   Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan untuk usulan kenaikan gaji berkala bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

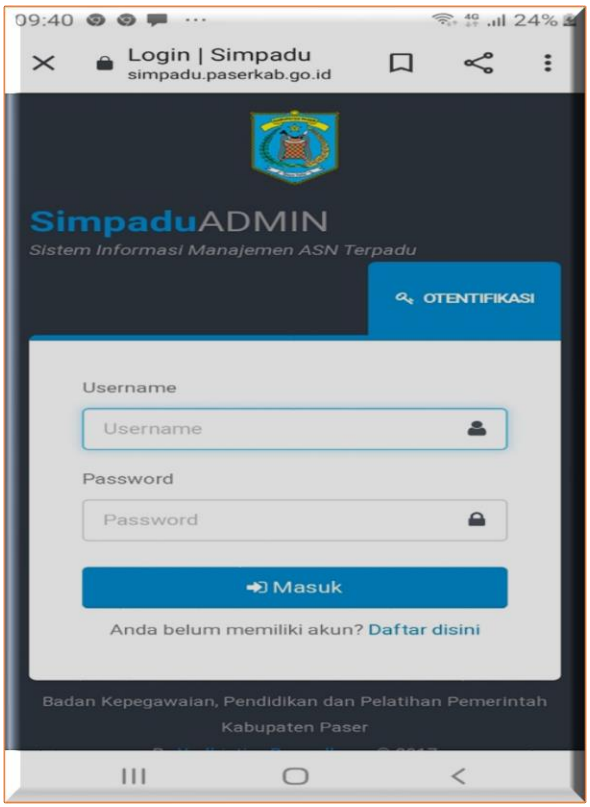

Ketiga aplikasi pelayanan yang merupakan inovasi sendiri oleh tim IT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadikan BKPSDM sebagai kandidat dalam lomba Inovative Government Award (IGA) Tahun 2020 dan sebagai realisasinya pada Desember 2020, BKPSDM menerima penghargaan Inovasi Daerah yang di selenggarakan oleh Bappedalitbang sebagai Inovasi kategori terinovatif.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser selaku pengemban amanan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja BKPSDM Kabupaten Paser. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat penca[aian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 beserta perubahannya sebagimana tertuang dalam Revisi Renstra BKPSDM sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser nomor 700/09.2/Sek II/II/BKPSDM tanggal 23 Januari 2020 beserta Renja Tahun 2020. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang digunakan dalam penilaian adalah verpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam Peraturan ini juga mengatur tentang kinerja yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Capaian Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	85 ≤ 100	Sangat Berhasil
2	70 ≤ 85	Berhasil
3	55 ≤ 70	Cukup Berhasil
4	0 ≤ 55	Kurang Berhasil

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat-Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPSDM tahun 2020 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dnegan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	Persen	51.15	52.23	101.11
		Persentase ASN yang telah mengikuti	Persen	22	13.07	59.41

		pendidikan dan pelatihan formal				
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	Persen	66.67	97.87	97.87
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	110
3	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record Data yang Diupdate	Persen	100	97.02	97.02
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawainnya	Persen	100	98	98
	Rata-Rata					**93.9**

Tabel. 3.3.
Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Kerja RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Rasio Capaian
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Penerapan Seleksi ASN berbasis Komputer	137	229	167.15
		Cakupan Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat Waktu	100%	81.54	81.54
		Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Sistem Informasi	4.691 orang	4.691 orang	100
2.	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penetapan Pejabat Struktural Berdasarkan Hasil Seleksi Jabatan/Assesment	100%	0%	0%
		Persentase PNS yang telah Lulus Diklat PIM	100%	100%	100%

		Cakupan Jabatan Struktural yang Diisi Berdasarkan Seleksi Terbuka	100%	0%	0%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pejabat Fungsional yang telah Mengikuti Diklat Fungsional	100&	69.10 %	69.10%
		Jumlah Tenaga Pengawas yang Bersertifikat	40	26	65%
		Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi sesuai Standar	100%	12.90	12.90

Berdasarkan tabel capaian Indikator Program Prioritas RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capainnya 0 yaitu Persentase Penetapan Pejabat Struktural Berdasarkan Hasil Seleksi Jabatan/Assesment dan Cakupan Jabatan Struktural yang Diisi Berdasarkan Seleksi Terbuka, hal tersebut disebabkan seleksi terbuka yang diselenggarakan guna mengisi 4 (empat) jabatan Pimpinan Tinggi belum dapat ditetapkan karena Kabupaten Paser memasuki masa Pemilu, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengatur secara jelas adanya larangan bagi pejabat untuk melakukan mutasi jabata dalam enam bulan sebelum penetapan dan enam bulan setelah penetapan calon pasangan Kepala Daerah.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Berikut disjaikan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN

Kompetensi pegawai ASN dapat dipahami sebagai kombinasi keterampilan (*skill*), atribut personal dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, dan dievaluasi. Guna mewujudkan ASN yang professional, bertanggung jawab dan berkompeten maka pengembangan karier PNS harus berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Indikator sasaran ini diambil dengan mengacu pada Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kualitas kompetensi ASN selalu berkaitan dengan kinerja sehingga kompetensi ASN merupakan kemmapuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN yang berpengatahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang tak lain yaitu sebagai pelayan publik yang sudah seharusnya dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Capaian kinerja indikator sasaran pertama ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yakni (1) Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3, (2) Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan (3) Persentase jumlah aparatur sesuai kebutuhan. Adapun capaian dari ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator 1. Persentase ASN yang Berpendidikan S1, S2 dan S3

Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja Indikator
Persentase ASN yang Berpendidikan S1, S2 dan S3

Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Ratio Capaian
2018	50	48.37	96.74
2019	55	51.49	93.62
2020	51.15	52.23	102.11

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 rumus indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$$

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 87.05 %, hal tersebut berdasarkan perhitungan jumlah ASN berpendidikan S1, S2 dan S3 sebesar 2.450 orang dibandingkan jumlah total seluruh ASN yakni 4.691 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan, hal tersebut disebabkan jumlah ASN yang pensiun dibandingkan jumlah pengangkatan PNS pada tahun 2020 (seleksi CPNS tahun 2019 dilanjutkan pada tahun 2020). Secara kesleuruhan perbandingan jumlah ASN dengan pendidian S1 masih jauh diatas kualifikasi pendidikan yang lain, untuk itu penyelenggaraan kegiatan ujian dinas masih terus dilakukan guna meningkatkan kualifikasi Aparatur Sipil Negara daerah.

Indikator 2. Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja Indikator
ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Ratio Capaian
2018	15	5.59	37.27
2019	20	9.11	45.55
2020	22	13.07	59.41

Formulasi perhitungan indikator kedua sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$$

Perhitungan indikator ini dengan memasukkan indikator penilaian yakni jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan, diklat fungsional keterampilan maupun keahlian, diklat teknis, serta seminar/workshop sejenisnya, namun demikian perhitungan indikator ini masih terdapat kelemahan, karena masih banyak Aparatur Sipil Negara yang belum mengupdate status kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola BKPSDM, namun update data telah dilakukan secara berkala setiap awal tahun. Pada tahun 2020 capaian indikator ini adalah 59.41 naik sebesar 14% dari tahun sebelumnya yakni 45.55%. Kenaikan angka capaian tersebut sebagian besar disebabkan karena penambahan anggaran untuk diklat teknis pada perubahan tahun 2020.

Indikator 3. Persentase Jumlah Aparatur sesuai Kebutuhan

Tolak ukur capaian sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan dengan kompetensi aparatur adalah persentase pemenuhan kebutuhan dengan kompetensi aparatur, dengan rumusan sebegai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah formasi jabatan yang terisi}}{\text{Jumlah Kebutuhan pegawai}} \times 100$$

Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja Indikator
Persentase Jumlah Aparatur sesuai Kebutuhan

Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Ratio Capaian
2018	100	0	0
2019	100	111	111
2020	66.67	97.87	97.87

Capaian indikator sasaran yang ketiga ini pada tahun 2020 mencapai 97.87% sedangkan pada tahun 2019 111%. Capaian indikator ini tidak mencapai 100% hal tersebut dikarenakan dari jumlah pendaftar CPNS tahun 2019 sebanyak 2.128 orang, 1.773 orang lulus verifikasi dan sebanyak 355 orang tidak lulus verifikasi. Sedangkan pada tahun 2019, dengan pendaftar CPNS tahun 2018, target formasi hanya 150 jabatan sedangkan formasi yang tersisi ada 167 jabatan sehingga capaian untuk tahun 2020 adalah 97.87%. Namun dengan adanya pandemic Corona Virus, maka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bakat (SKB) mengalami sedikit perubahan dalam pola pelaksanaannya, namun hal tersebut tidak menjadi kendala pelaksanaan test karena telah dibijaksanai dengan kemudahan bahwa pserta dapat mengikuti test di BKD atau tempat yang ditentukan dalam kota yang bersangkutan.

Tabel 3.7.
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN

No.	Indikator Sasaran	Target Capaian		Realisasi Capaian		Ratio Capaian	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	55	51.15	51.49	52.23	93.62	101.11
2.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20	22	9.11	13.07	45.55	59.41
3.	Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	100	66.67	111	97.87	111	146.80
	Rata-Rata			**57.20**	**54.39**		

Rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN pada tahun 2020 adalah 54.39 sedangkan pada tahun 2019 adalah 57.20. Capaian indikator terendah masih pada Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, meskipun

demikian telah dilakukan beberapa upaya untuk seperti melakukan update secara berkala database pegawai termasuk riwayat pendidikan dan pelatihan, sosialisasi secara langsung dan tidak langsung tentang jabatan fungsional dan jenjang karirnya, namun adanya beberapa perangkat daerah yang mengelola sendiri penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya sehingga sedikit menyulitkan untuk melakukan pendataan perkembangan kompetensi ASN nya.

Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Untuk mengukur kualitas manajamen kepegawaian disini digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menghitung jumlah pelayanan kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu, seperti pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mutasi pegawai, cuti, pensiun, pensiun duda/janda, tugas belajar, ijin belajar, diklat tekhnis dan fungsional, karsu dan karis dan perubahan data pegawai. Adapun capaian indikator ini pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Ratio Capaian
2018	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (99)	100
2019	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (99.16%)	100
2020	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (91.09)	100

Indeks Kepuasan Masyarakat melalui formulasi jumlah pelayanan kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu turun dari 99% tahun 2019 menjadi 91.09% pada tahun 2020. Adanya pandemic virus corona sedikit mempengaruhi jam pelayanan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, meskipun beberapa pelayanan sudah sebagian secara online namun tetap saja jam kerja yang sedikit berubah dan koordinasi ke Kantor Regional VIII BKN (Badan

Kepegawaian Negara) Banjarmasin juga beberapa kali tertunda karena larangan penerimaan layanan dari daerah zona tertentu pada saat pandemi virus corona.

Tabel 3.9.
Persentase Pelayanan Kepagawaian Tepat Waktu
Tahun 2019-2020

No.	Jenis Layanan	Persentase Layanan tepat waktu	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai	98.06	90.89
2	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala ASN	94.45	90.58
3	Pelayanan Mutasi pegawai	80.22	89.40
4	Pelayanan Cuti Pegawai	92.00	95.00
5	Pelayanan Pensiun Pegawai	100	100
6	Pelayanan Pensiun Janda/Duda	100	100
7	Pelayanan Tugas Belajar	100	61.90
8	Pelayanan Ijin Belajar	99.17	100
9	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	98.53	73.99
10	Pelayanan Pengangkatan Jabatan Fungsional	NA	85.04
11	Pelayanan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural	87	83.33
12	Pelayanan Peremajaan Data Pegawai	100	100
13	Pelayanan Pembuatan/Perubahan Kartu Pegawai	139.68	105.26
14	Pelayanan penerbitan KARIS/KARSU ASN	100	100
	Rata-Rata	**99.16**	**91.09**

Sasaran 3. Mewujudkan Tata Kelola Informasi Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat

Adanya tata kelola informasi kepegawaian yang cepat, tepat dan bertanggung jawab juga transparan merupakan salah satu kunci yang mendukung berjalannya merit system. Dengan adanya informasi kepegawaian yang akurat maka tidak hanya penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan tapi juga pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karier, promosi dan mutase, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension dan jaminan hari tua dan perlindungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tabel 3.10.
Pengukuran Kinerja Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Informasi Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat

No.	Indikator Sasaran	Target Capaian		Realisasi Capaian		Ratio Capaian	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Persentase Record Data yang Diupdate	100	100	96	97.02	96	97.02
2.	Persentase SKPD yang melaporkan Data Kepegawaian	100	100	98	98	98	98
	Rata-Rata			**97**	**97.51**		

Indikator 1. Persentase Recor Data yang Diupdate

Formulasi capaian indikator pada sasaran ini yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah data kepegawaian yang diupdate}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$$

Tabel 3.11.
Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Record Data yang Diupdate

Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Ratio Capaian
2018	100	89	89
2019	100	96	96
2020	100	97.02	97.02

Kegiatan-kegiatan pada indikator sasaran ini hampir semua mencapai target, bahkan realisasi fisik keuangan pun hamper 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem yang dapat mendukung kemudahan dalam perekaman data dan komitmen petugas dalam menyelesaikan update pegawai yang sangat penting guna keperluan kerja BKPSDM sendiri. Meskipun hasil capaian ini cukup tinggi namun beberapa data pegawai harus selalu dilakukan update karena tingginya kebutuhan data kepegawaian guna data kebutuhan pengembangan karir ASN dan pengambilan kebijakan terkait kepegawaian lainnya. Beberapa kegiatan yang menunjang indikator ini yaitu Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Pengelolaan Tata naskah/Roll O Pack PNS dan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan.

Indikator 2. Persentase SKPD yang Melaporkan Data Kepegawaiannya

Tabel 3.12.
Pengukuran Kinerja Indikator Persentase SKPD yang melaporkan Data Kepegawaian

Tahun	Target Capaian	Realisasi Capaian	Ratio Capaian
2018	100	98	89
2019	100	98	96
2020	100	98	97.02

Data kepegawaian pada umumnya dikumpulkan oleh Perangkat Daerah, pada tahun 2020 kurang lebih ada sekitar 8.567 kali perubahan data kepegawaian, mulai dari data masa kerja, jabatan, riwayat pendidikan dan lain-lain.

Data capaian indikator kedua dari sasaran ke 3 (tiga) ini juga cukup tinggi, karena data ini pada dasarnya merupakan data dasar yang sangat diperlukan guna kebutuhan data lainnya terkait kepegawaian, pemetaan kompetensi, pengkuran kualifikasi pegawai sangat membutuhkan keakuratan data yang diupdate, sama halnya dengan record data, data kepegawaian yang di laporkan Perangkat Daerah merupakan data dasar yang saling melengkapi sehingga dapat diolah untuk kepentingan kebijakan kepegawaian lainnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dalam penyelenggaraan suatu Perangkat Daerah dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasatan yang harus dicapai.

Kegiatan operasional akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Rumus Efisiensi :

Tingkat Efisiensi = %tase capaian kinerja – %tase penyerapan anggaran x 100%

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2020
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	554.321.000,-	6.974.205.708,-	99.33
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3.552.818.740,-	2.588.768.459,-	72.87
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	8.446.511.880,-	6.423.575.331,-	76.05
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.242.370.976,-	1.915.320.436,-	85.41
3.	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record Data yang Diupdate	138.345.050,-	133.879.600,-	96.77
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawainnya	160.400.500,-	53.307.050,-	33,23

Tabel 3.14
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Realisasi Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi
1	Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	52.23	99,33	(47.10)
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	13.07	72.87	(59.80)
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	97.87	91.92	5..95
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (91.09)	85.41	5.68
3	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record Data yang Diupdate	97.02	96.77	0.25
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawainnya	98	33.23	64.77

Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN

Indkator 1 : Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3

Capaian kinerja pada indikator ini tahun 2020 adalah 52.23%, sedangkan capaian realisasi keuangan indikator ini adalah 99.33%, namun tingkat efisiensi dari indikator ini sangatlah rendah yaitu negatife (-47.10%). Ini bearti kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapain kinerja indikator ini masih belum maksimal, melihat indikator ini menyangkut tingkat kualifikasi pendidikan ASN yang ada di Kabupaten Paser, maka secara kualifikasi memang separuh ASN berpendidikan di bawah S1, yakni sebagai

berikut :

1. Pendidikan SD sebanyak 44 orang
2. Pendidikan SMP sebanyak 55 orang
3. Pendidikan SMA sebanyak 1.138 orang
4. Pendidikan D1 sebanyak 24 orang
5. Pendidikan D2 sebanyak 318 orang
6. Pendidikan D3 sebanyak 617 orang
7. Pendidikan D4 sebanyak 45 orang
8. Pendidikan S1 s.d S3 2.450 orang

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian target sasaran ini yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
   - Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
   - Pelaksanaan Ujian Dinas

Indikator 2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Capaian indikator sasaran ini jika dibandingkan dengan indikator lainnya yakni negatif (-59.80). Capaian realisasi kinerja indikator ini memang masih sangat rendah yaitu 13.07% sedangkan realisasi keuangan sebesar 72.87%. Namun jika dilihat berdasarkan capaian realisasi kinerja target yang digunakan juga rendah yaitu 22. Sehingga jika dibandingkan angka capaian realisasi memang sangat jauh hasilnya. Indikator ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi ASN.

Program kegiatan yang mendukunga tercapainya target indikator sasaran ini yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur
   - Lelang Jabatan ASN

- Assesment PNS
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah

Indikator 3. Persentase Jumlah PNS/Aparatur sesuai Kebutuhan

Dari capain kinerja indikator ini sebesar 97.87 % dan rata-rata realisasi keuangan program kegiatan pada indikator ini adalah 76.05% sehingga persentase tingkat efisiensi indikator ini cukup positif yakni 5.95%. Artinya capaian kerja yang dihasilkan cukup sepadan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, pelaksanaan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator ini dapat berjalan lancer dan sesuai dengan target yang diharapkan sehingga secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator ini cukup efisien. Berikut program dan kegiatan yang menunjang capaian indikator sasaran Persentase jumlah PNS/Aparatur sesuai kebutuhan :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   - Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
   - Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
   - Pengambilan Sumpah Janji PNS
   - Seleksi Penerimaan Calon PNS

Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator 1. Indeks Kepuasan ASN

Capaian kinerja inidkator ini adalah sangat baik atau dari perhitungan persentase pelayanan kepagawaian yang terselesaikan tepat waktu sebasar 91.09 dan capaian realisasi keuangan 85.41% sehingga hasil perhitungan tingkat efisiensi adalah 5.68. Angka capaian ini masih positif sehingga dapat diasumsikan jumlah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program kegiatan yang mendukung kinerja

indikator ini cukup efisien. Adapun program kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
   - Penyelesaian SK Pensiun/ Nota Usul Persetujuan BKN
   - Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS
   - Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS
   - Pembuatan Kartu Identitas PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
   - Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian
   - Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
   - Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat
   - Penyelesaian Penerbitan SK Jabatan Fungsional
   - Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat
   - Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
   - Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN
   - Penataan Administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat
   - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Memenuhi Masa Kerja Yang Telah Ditentukan
   - Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas
4. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI
   - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
   - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
   - Penyelenggaraan MTQ KORPRI

Pada umumnya kegiatan pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan yang bersifat fasilitasi, artinya semua berkas pelayanan tidak berakhir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten saja, sebagian besar berkas kepegawaian diantar untuk verifikasi, validasi atau rekomendasi dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Kalimantan Selatan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga biaya yang cukup besar yang dibutuhkan adalah biaya transport untuk pengantaran berkas, untuk sementara pelayanan dengan menggunakan sistem masih terbatas sehingga anggaran atau biaya operasional kegiatan pelayanan cukup besar.

Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator 1. Persentase Record Data yang diUpdate

Capaian kinerja indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah 97.02 sedangkan capaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah 96.77 sehingga tingjat efisiensi adalah positif (0.25). Demikian halnya indikator pelayanan, indikator ini dapat diasumsikan penggunaan sumber daya pada indikator sasaran ini cukup efisien.

Adapun program kegiatan yang mendukungan pencapaian indikator sasaran ini adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
   - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
   - Rekonsiliasi Data Kepegawaian
   - Pengelolaan Tatanaskah/ Roll O Pack PNS

Indikator 2. Persentase SKPD yang Melaporkan Data Kepegawaiannya

Capaian kinerja indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah 98 sedangkan capaian realisasi anggaran program kegiatan yang menunjang indikator sasaran ini hanyalah sebesar 33.23%. Itu bearti tingkat efisiensinya cukup tinggi yaitu sebesar 64.77. Hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan terkait data kepegawaian yang melibatkan orang banyak dalam hal ini kegiatan sosialisasi kepegawaian seperti penyusunan SKP, dan monitoring serta evaluasi ke beberapa perangkat daerah tertunda dilaksanakan karena adanya pandemic covid-19. Namun untuk capaian kinerja hampir tercapai 100%, seperti penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan pelayanan perubahan data kepegawaian dan monitoring secara berkala tetap berjalan dengan memanfaatkan media online yang sekarang banyak digunakan.

Berikut program kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawaiannya :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
   - Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian
   - Penilaian Kinerja PNS
   - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN
   - Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Hasil kegiatan dari program-program yang berhasil dilaksanakan pada BKPSDM Kabupaten Paser tahun 2020 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penerimaan seleksi CPNS yang dilaksanakan BKPSDM tahun 2020 untuk formasi tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan pengumuman Bupati Paser nomor 810/551/Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 tentang seleksi Calon pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Jumlah formasi CPNS tahun 2019 adalah 141 jabatan sedangkan jumlah yang terisi adalah 138 jabatan. Pelaksanaan kegiatan seleksi awal dilakukan sebagaimana biasanya, namun untuk pelaksanaan SKB dilakukan selama kurang lebih 1 minggu sesuai dengan pengumuman panitia seleksi Nomor 810/007.PANSELDA-CPNS/2020 Agustsu 2020 hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembatan jumlah peserta per sesi nya dan adanya jeda untuk pemberian disenfektan untuk ruangan pelaksanaan test.

Gambar 3. Kegiatan Seleksi CPNS Kabupaten Paser Formasi Tahun 2019 Tahun Pelaksanaan 2020

2. Terlaksananya kegiatan ujian dinas dimasa pandemi cukup menjadi keberhasilan kecil, sebagai salah satu upaya meningkatan kompetensi ASN, jumlah peserta ujian dinas sebanyak 67 orang dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) sesi selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan.

Gambar 4. Pembukaan Kegiatan Ujian Dinas Tahun 2020

3. Sama halnya dengan kegiatan Ujian Dinas, kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS dilaksanakan dua kali dengan pengambilan tempat secara terpisah yakni Ruang Rapat Sadurengas dan Pendopo dan dilaksanakan secara virtual, sebanyak kurang lebih 167 orang CPNS diambil sumpah oleh Wakil Bupati Paser.

Gambar 5. Pengambilan Sumpah 167 CPNS di Ruang Rapat Sadurengas oleh Wakil Bupati Paser, Kaharuddin.

4. Terbitnya KARIS dan KARSU Aparatur Sipil Negara sebanyak 490 lembar.
5. Terprosesnya usulan kenaikan pangkat periode April dan Oktober Tahun 2020 sebanyak 479 SK dan sebanyak 48 orang terlambat/tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diproses.
6. Pemberian tugas belajar masih melanjutkan periode sebelumnya sebanyak 13 orang, dan sebanyak 8 orang merupakan Dokter, sementara tahun ini sebenarnya ad 21 usulan, namun karena keterbatasan anggaran sehingga usulan tersebut tidak dapat disetujui.
7. Pemberian ijin belajar untuk tahun 2020 sebanyak 49 orang.

8. Terselesaikannya pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran disiplin sebanyak 3 kasus.
9. Masuknya 3 (tiga) aplikasi layanan kepegawaian pada lomba Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang.
10. Terlaksanaanya pendidikan pelatihan, untuk diklat struktural eselon II sebanyak 2 (dua) orang, diklat fungsional keterampilan sebanyak 8 orang dan pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 118 orang.

Meskipun beberapa kegiatan dari program-program yang telah berhasi dilaksanakan tahun 2020, terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian indikator kinerja seperti yang ditelah ditetapkan, yaitu :

1. Pandemi virus corona menyebabkan harus dilakukannya beberapa penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan beberapa kegiatan khususnya yang melibatkan publik/orang banyak, selain itu dengan adanya tuntutan pelaksanaan kegiatan memberikan konsekuensi perubahan kebutuhan anggaran yang justru termasuk sulit untuk disetujui karena Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melakukan recofussing anggaran guna penanganan Covid-19 sebagimana tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Kebijakan kelembagaan baru masih dalam tahap penyesuaian sehingga beberapa kegiatan memberikan pengaruh yang cukup banyak bagi pengelolaan kepegawaian seperti Perumusan TPP, penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi pelaksana yang masih melakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang terdapat perubahan numenklatur.

3. Pengukuran kompetensi Aparatur Sipil Negara dan penyesuaian formasi dengan kompetensi masih belum maksimal bisa dilakukan, namun upaya penempatan pegawai sudah dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan, diklat dan pelatihan teknis.

2.2. Realisasi Anggaran

Bidang urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 10.724.646.867,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 4.439.000.000,00 dan belanja langsung (BL) berdasarkan pagu murni tahun 2020 adalah Rp. 12,078.170.000,- mendapat pengurangan anggaran karena recofussing sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES) nomor 4 tahun 2020 tentang Recofussing Kegiatan, realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Vovid-19) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.285.647.044,44 Realisasi total anggaran tahun 2020 adalah Rp. 8.711.356.485,00 (81.23%) terdiri dari realisasi belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 3.854.255.624,00 (86.83%) dan realisasi belanja langsung (BL) sebesar Rp. 4.857.100.861,00 (77.27%) sebagimana diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.15. Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realiasai (Rp)	% Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	4.439.000.000,-	3.854.255.624,-	86.83
2.	Belanja Langsung	6.285.647.044,44	4.857.100.861,-	77.27
	Jumlah	10.724.646.867,-	8.711.356.485,-	81.23

Sumber : Calk BKPSDM, 2020

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja langsung digunakan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan dalma rangka mewujudkan sasaran

strategis. Adapun program/kegiatan penyelenggaraan adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Program Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
Tahun Anggaran 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %
1	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240.000,-	240.000,-	0,-	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,-	2.549.500,-	1.450.500,-	63.74
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	123.588.300,-	122.654.800,-	933.500,-	99.24
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.297.500,-	25.258.389,-	39.111,-	99.85
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	5.617.500,-	5.551.000,-	66.500,-	98.82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.570.000,-	1.567.000,-	3.000,-	99.81
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,-	14.498.000,-	2.000,-	99.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.825.000,-	1.794.000,-	31.000,-	98.30
	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	60.000.000,-	59.743.320,-	256.680,-	99.57
	Penataan Arsip SKPD	48.614.400,-	48.406.400,-	208.000,-	99.57
	Rapat Kerja Daerah	12.198.900,-	0,-	12.198.900,-	0
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	51.231.500,-	50.815.000,-	416.500,-	99.19

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	29.800.000,-	29.775.000,-	25.000,-	99.92
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	6.000.000,-	5.925.000,-	75.000,-	98.75
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.687.500,-	5.170.000,-	1.517.500,-	77.31
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.850.000,-	2.780.000,-	70.000,-	97.54
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural	70.675.000,-	37.375.000,-	33.300.000,-	52.88
	Pengambilan Sumpah Janji PNS	27.284.400,-	20.774.200,-	6.510.200,-	76.14
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas	30.232.600,-	0,-	30.232.600,-	0,-
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	1.041.067.100,-	156.499.600,-	884.567.500,-	15.03
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten	1.495.000,-	885.000,-	610.000,-	59.20
6	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah				
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	5.438.800,-	4.238.800,-	1.200.000,-	77.94
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Penyusunan RENJA SKPD	4.798.800,-	2.748.800,-	2.050.000,-	57.88

	Evaluasi RENJA SKPD	4.908.700,-	3.233.700,-	1.675.000,-	65.88
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	57.133.127,-	54.585.127,-	2.548.000,-	95.54
7	Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur				
	Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan Oleh Tim BAPERJAKAT	365.375.000,-	280.116.197,-	85.258.803,-	76.67
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	1.092.176.110,-	1.083.808.432,-	8.367.678,-	99/23
	Pelaksanaan Ujian Dinas	86.463.400,-	81.143.600,-	5.319.800,-	93.85
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	554.321.000,-	550.630.377,-	3.690.623,-	99.33
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	463.686.300,-	458.738.036,-	4.948.264,-	98.93
	Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat	172.666.100,-	163.250.400,-	9.415.700,-	94.55
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	73.111.500,-	72.347.600,-	763.900,-	98.96
	Penyelesaian SK Pensiun/ Nota Usul Persetujuan BKN	65.660.750,-	61.218.700,-	4.442.050,-	93.23
	Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	26.000.000,-	25.472.000,-	528.000,-	97.97
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	44.290.300,-	40.290.300,-	4.000.000,-	90.97
	Pengelolaan Tatanaskah/ Roll O Pack PNS	63.283.550,-	59.582.000,-	3.701.550,-	94.15
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan	17.181.250,-	16.662.800,-	518.450,-	96.98

	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)				
	Penyelesaian Penerbitan SK Jabatan Fungsional	53.195.000,-	53.179.100,-	15.900,-	99.97
	Pembuatan Kartu Identitas PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	25.478.500,-	20.524.900,-	4.953.600,-	80.56
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	154.232.700,-	141.145.800,-	13.086.900,-	91.51
	Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS	81.001.200,-	74.170.800,-	6.830.400,-	91.57
	Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	25.268.750,-	24.657.000,-	611.750,-	97.58
	Lelang Jabatan ASN	474.766.000,-	422.073.790,-	52.692.210,-	88.90
	Assesment PNS	169.900.030,-	164.992.801,-	4.907.229,-	97.11
	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Memenuhi Masa Kerja Yang Telah Ditentukan	75.108.550,-	69.057.600-	6.050.950,-	91.94
	Fasilitasi Pengelolaan Assesment Center	224.759.800,-	221.512.200,-	3.247.600,-	98.56
	Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	21.618.750,-	21.617.046,-	1.704,-	99.99
	Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN	34.138.400,-	33.932.400,-	206.000,-	99.40
	Penilaian Kinerja PNS	116.110.200,-	13.016.750,-	103.093.450,-	11.21
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	41.429.600,-	40.942.600,-	487.000,-	98.82
	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	1.950.000,-	1.950.000,-	0,-	100
9	Program Fasilitasi dan Dukungan				

	Kelembagaan KORPRI				
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	39.645.000,-	0,-	39.645.000,-	0.-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	75.025.000,-	0,-	75.025.000,-	0,-
	Penyelenggaraan MTQ KORPRI	6.750,000,-	0,-	6.750,000,-	0,-
	Jumlah	**6.285.647.044,04**	**4.857.100.861,0**	**1.428.546.002,-**	**77.27**

Sumber : CaLK BKPSDM, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat serapan dana pada tingkat pelaksanaan kegiatan yang realisasinya rendah. Adapun penjelasan realisasi keuangan yang rendah serapannya yakni di bawah 70% dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi sebesar Rp. 2.549.500,- dari pagu sebesar Rp. 4.000.000,- atau 63.74%. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pembayaran perijinan seperti pajak untuk kendaraan operasional kantor, jumlah yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.549.500,- sehingga anggaran ini masih banyak tersisa.
2. Kegiatan Rapat Kerja Daerah. Dari total pagu Rp. 12.198.900,- tidak dapat terealisasi karena rapat kerja daerah ini merupakan kegiatan rutin Dewan KORPRI yang merupakan kegiatan rapat kerja dalam rangka sinkronisasi serta sinergitas KORPRI dan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, namun karena pandemi Virus Covid-19, kegiatan yang biasa dilaksanakan di menjelang akhir tahun ini tidak bisa dilaksanakan.
3. Kegiatan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural. Dari pagu Rp. 70.675.000,- hanya terserap Rp. 37.375.000,- atau 52.88%. Hal tersebut disebabkan kegiatan Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabatn yang seyogyanya memang

direncanakan untuk dilaksanakan setelah dilakukannya seleksi terbuka Pejabat Tinggi Pratama Eselon II, namun ternyata hasil seleksi keluar menjelang Pemilu Bupati Paser, sehingga jika melihat berdasarkan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengatur secara jelas adanya larangan bagi pejabat untuk melakukan mutase jabata dalam enam bulan sebelum penetapan dan enam bulan setelah penetapan calon pasangan Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan pelantikan pejabat eselon II dan seterusnya tidak dilselenggarakan.

4. Kegiatan Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas. Pagu kegiatan ini adalah Rp. 30.232.600,- tidak dapat terealisasi atau tidak terlaksanakan, dengan pertimbangan keprioritasan kegiatan dan keamanan dan keselamatan di saat penyebaran virus covid-19, sesuai dengan Instruksi Bupati Paser dalam rangka pengendalian Covid-19 untuk membatasi kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak maka kegiatan ini tidak dilaksanakan.
5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS. Pagu kegiatan ini adalah Rp. 1.041.067.100,- dan hanya terealisasi untuk pelaksanaan diklat PIM untuk Eselon II yang dilaksanakan secara daring/online sebesar Rp. 156.499.600,-. Sebagian besar anggaran merupakan anggaran biaya pengiriman pejabat Pengawas dan Administratif yang tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya karena tempat daerah tempat Diklat (hamper seluruh daetah di Indonesia) juga dalam pembatasan kegiatan karena pandemic virus covid-19.
6. Kegiatan Penyusunan Renja. Realisasi anggaran kegiatan ini hanya 57.28% atau sebesar Rp. 2.748.800,- dari Rp. 4.798.800,-. Belanja yang tidak dapat terealisasi pada kegiatan ini adalah kegiatan makan minum rapat yang seyogyanya dilaksanakan, namun untuk pembatasan berkumpul dalam jangka waktu lama, maka kegiatan rapat hanya dilakukan 1 kali saja.
7. Kegiatan Evaluasi Renja. Kegiatan ini hanya teralisasi sebesar 65.88% atau

Rp. 3.233.700,- dari 4.908.700,- dengan penyebab rendahnya realisasi sama dengan kegiatan penyusunan renja.

8. Kegiatan Penilaian Kinerja PNS. Dari pagu sebesar Rp. 116.110.200,- terealisasi sebesar Rp. 13.016.750 atau 11.21%. Berbeda dengan capaian kinerja kegiatan ini sudah tercapai 100%, namun kegiatan penyusunan rumusan Sasaran Kinerja Pegawai(SKP) yang semula dilaksanakan menjelang akhir tahun batal dilaksanakan karena mepetnya waktu pelaksanaan dan minimnya tenaga yang bisa dilibatkan sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan. Terlebih acuan perumusan SKP mengacu pada pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 atau Kemendagri 50 tahun 2020 ini baru diterapkan pada tahun 2020 maka perumusan SKP untuk mengganti uraian analisa jabatan yang lama baru bisa direncanakan lagi pada tahun 2020.
9. Program Fasilitasi dan Dukingan Kelembagaan KORPRI. Pada program ini ada 3 (tiga) kegiatan yakni kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Penyelenggaraan ompetisi olahraga dan Penyelenggaraan MTQ KORPRI, ketiga kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi karena pandemic covid-19, sehingga kegiatan ini yang hamper sebagian besar adalah kegiatan dengan mengumpulkan orang dengan jumlah banyak, maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

BAB IV. PENUTUP

Bab 4 berisi :

Kesimpulan dan Saran

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser pada tahun anggaran 2020 merupakan tahun keempat dari rencana strategis BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasisemua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2020 dapat disumpulkans ebagai berikut :Dari analisis seluruh capaian sasaran kinerja rencana strategis BKPSDM rata-rata capaian sasaran adalah 93.6%, itu bearti jika diukur berdasarkan skala ordinas keberhasilan maka dianggap sangat berhasil. Sementara capaian paling rendah terletak pada indikator Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian hanya 13.07 sedangkan capaian paling tinggi ada pada indikator sasaran Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawaiannya sebesar 98%. Rendahnya capaian target ini dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, untuk itu butuh perhatian semua pihak terkait yang berkenaan dalam menunjang capaian kinerja indikator sasaran tersebut.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait
2. Memberikan perhatian khusus atas program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran untuk bisa mencapai target sesuai dengan harapan
3. Melaksanakan pengembangan pegawai di bidang pendidikan serta kompetensi untuk menunjang kegiatan
4. Melakukan alternative menyelesaikan kekurangan pegawai dengan seleksi penerimaan pegawai non PNS kontrak
5. Koordinasi dalam rangka percepatan penataan kelembagaan dan pemetaan kompetensi ASN sehingga penataan pegawai bisa segera dirumuskan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :

1. FORM PERJANJIAN KINERJA
2. FORM PENGUKURAN KINERJA
3. FORM RENCANA AKSI
4. FORM HASIL EVALUASI KINERJA TRIWULAN
5. DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIRAIH
6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
7. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
8. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Drs. SUWITO**
NIP	:	196508081992031019
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama	:	**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**
Jabatan	:	Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 07 Januari 2020

Pihak Kedua,
Bupati Paser

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (Baik)
		Jumlah aplikasi pengembangan SIMPEG	10 Dokumen
		Persentase record data pegawai yang update	500%
		Persentase Tata Naskah pegawai yang dikelola sesuai NIP	10.030 Tata Naskah
2.	Meningkatkan ASN yang Berkualitas dan Kompeten	Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	205 Orang
		PNS yang mengikuti dan lulus diklat teknis tugas dan fungsi	644 Orang
		Persentase Penurunan Pelanggaran Hukuman Disiplin dan Etika Pegawai	500%
		Pengadaan pegawai pada SKPD sesuai formasi	400 Orang
		Persentase penetapan Pejabat Struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	500%
		Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Assessment Test	500%

Program	Kegiatan		Anggaran	Ket
1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)**				
	1. Penyediaan jasa Surat Menyurat	Rp.	480.000,00	APBD
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	60.000.000,00	APBD
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan jabatan / dinas / operasional	Rp.	4.000.000,00	APBD
	4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Rp.	141.910.800,00	APBD
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	48.350.500,00	APBD

	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	11.235.000,00	APBD
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	3.140.000,00	APBD
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	36.358.000,00	APBD
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	1.825.000,00	APBD
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	8.000.000,00	APBD
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp.	240.000.000,00	APBD
	12. Penataan Arsip SKPD		55.859.400,00	APBD
2.	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**			
	1. Pengadaan Meubelair	Rp.	26.739.200,00	APBD
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.	48.063.000,00	APBD
	3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp.	32.400.000,00	APBD
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	12.000.000,00	APBD
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	13.375.000,00	APBD
	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp.	5.700.000,00	APBD
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			
	1. Pengambilan Sumpah & Pelantikan Pejabat Struktural	Rp.	101.325.000,00	APBD
	2. Pengambilan Sumpah Janji PNS	Rp.	31.284.400,00	APBD
4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			
	1. Pembekalan Bagi PNS yang Akan Memasuki Purna Tugas	Rp.	402.067.600,00	APBD
	2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Rp.	4.192.199.600,00	APBD
5.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			
	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Rp.	2.000.000,00	APBD
6.	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**			
	1. Penyusunan Data Statistik Sektoral	Rp.	7.150.000,00	APBD
7.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			
	1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan BKD kabupaten Paser	Rp.	68.298.200,00	APBD
	2. Penyusunan RENJA SKPD	Rp.	17.750.000,00	APBD
	3. Evaluasi RENJA SKPD	Rp.	26.600.000,00	APBD
8.	**Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur**			
	1. Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan oleh Tim Baperjakat	Rp.	400.470.000,00	APBD
	2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah	Rp.	1.157.877.600,00	APBD
	3. Pelaksanaan Ujian Dinas	Rp.	86.463.400,00	APBD

9. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

1.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Rp.	497.946.000,00	APBD
2.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Rp.	647.720.100,00	APBD
3.	Penetapan Sistem Satu Atap Kenaikan Pangkat	Rp.	393.803.600,00	APBD
4.	Pengelolaan dan Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Rp.	118.899.600,00	APBD
5.	Penyelesaian SK Pensiun/Nota Usul Persetujuan BKN	Rp.	224.267.000,00	APBD
6.	Penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS	Rp.	104.000.000,00	APBD
7.	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Rp.	82.710.000,00	APBD
8.	Pengelolaan Tata Naskah/Roll-O-Pack PNS	Rp.	105.075.000,00	APBD
9.	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan SAPK	Rp.	68.725.000,00	APBD
10.	Penyelesaian Penerbitan SK jabatan Fungsional	Rp.	172.250.000,00	APBD
11.	Pembuatan Kartu Tanda Pengenal PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Rp.	53.582.000,00	APBD
12.	Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rp.	195.545.200,00	APBD
13.	Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat	Rp.	47.975.000,00	APBD
14.	Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS	Rp.	64.501.200,00	APBD
15.	Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	Rp.	48.300.000,00	APBD
16.	Lelang Jabatan ASN	Rp.	670.180.000,00	APBD
17.	Assessment PNS	Rp.	393.122.800,00	APBD
18.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Memenuhi Masa Kerja yang Telah Ditentukan	Rp.	146.239.800,00	APBD
19.	Fasilitasi Pengelolaan Assessment Center BKD Kabupaten Paser	Rp.	44.075.000,00	APBD
20.	Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	Rp.	86.475.000,00	APBD
21.	Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas/Mutasi Pegawai dan Status ASN (Pindah Tugas Antar Kab/Kota/Provinsi dan Lembaga)	Rp.	107.038.400,00	APBD
22.	Penilaian Kinerja PNS	Rp.	519.617.600,00	APBD

23.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	Rp.	32.500.000,00	APBD
24.	Rekonsilisasi Data Kepegawaian	Rp.	10.700.000,00	APBD

Tana Paser, 07 Januari 2020

Bupati Paser

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Drs. SUWITO**
NIP	:	196508081992031019
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama	:	**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**
Jabatan	:	Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, **Bupati Paser**	Pihak Pertama, **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si	**Drs. SUWITO** Pembina Tingkat I NIP. 196508081992031019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	51.15 %
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8.17 %
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	100 %
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record Data yang Diupdate	100
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawainnya	100

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	301.451.600,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp.	96.569.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	97.959.400,-	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	66.840.627,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	1.495.000,-	APBD
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	1.071.299.700,-	APBD
7.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp.	5.438.800,-	APBD
8.	Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur	Rp.	1.544.014.510,-	APBD
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.	2.979.158.230,-	APBD
10.	Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI	Rp.	121.420.000,-	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**6.285.646.867,-**	

Bupati Paser

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Tana Paser, 01 Oktober 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Katsul Wijaya, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Paser	
2	Drs. H. Arief Rahman, M.Si	Asisten Administrasi Umum	

LAMPIRAN II. PENGUKURAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti penddidikan dan pelatihan formal	22	13.07	59.41
		Persentase Jumlah CPNS/aparatur sesuai kebutuhan	66.67	97.87	146.80
		Jumlah penilaian kinerja melalui e-SKP	4.850	4.691	96.72
		Persentase penurunan pelangaran hukuman disiplin dan etika pegawai	30%	78.57%	261.90
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelsaian pelayanan kepegawaian tepat waktu	100%	81.54	81.54
3	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase SKPD yang melaporkan data Kepegawaian	100%	98	98

LAMPIRAN 3. FORM RENCANA AKSI

RENCANA AKSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator	Target				Kegiatan	Rencana Output					Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)
			TW I	TW II	TW III	TW 1V		TW I	TW II	TW III	TW IV	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Persentase ASN yang berpendidikan S1, S2 dan S3	56.25	57.5	58.75	60	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**							
							Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas				13	orang	Bid. Pengembangan & Mutasi Kepegawaian	497,946,000.00
							Pelaksanaan Ujian Dinas				67	orang		86,463,400.00
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20.5	21	21.5	22	**Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Aparatur**							
							Lelang Jabatan ASN				4	jbtn	Bid. Pengembangan & Mutasi Kepegawaian	670,180,000.00
							Assesment PNS		10		18	orang		393,122,800.00
							Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS		24			orang		4,192,199,600.00
							Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah		30	30	48	orang		1,157,877,600.00
		Persentase jumlah PNS/aparatur sesuai kebutuhan	61.67	63.34	65.01	66.67	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**							
							Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural				167	orang	Bid. Pengembangan & Mutasi Kepegawaian	107,038,400.00
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
							Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin	2	4	3	1	kasus	Bid. Penilaian Kinerja & Kesejahteraan ASN	195,545,200.00
							Pengambilan Sumpah Janji PNS			250		orang	Bid. Pengadaan & Informasi Kepegawaian	31,284,400.00
							Seleksi Penerimaan Calon PNS	140		860		orang		647,720,100.00
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	88	94	100	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**							
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	3	3	3	bulan	Sekretariat	48,350,500.00
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	3	3	3	3	bulan		3,140,000.00

						Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	3	3	3	3	bulan		11,235,000.00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		12	12		unit		36,358,000.00
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						Bid. Pengadaan & Informasi Kepegawaian	
						Penyelesaian SK Pensiun/Nota Usul Persetujuan BKN	35	54	43	28	SK		224,267,000.00
						Pengelolaan,pemanfaatan dan pemeliharaan SAPK	0	0	0	1	dok		68,725,000.00
						Pembuatan Kartu Identitas PNS Dilngkungan Pemerintah Kabupaten Paser							53,582,000.00
						Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	10	10	12	10	Kartu		86,475,000.00
						Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	0	0	140	0	org		104,000,000.00
						Pengembangan Sistem Administrasi kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS	1	1	1	1	Aplikasi	Bid. Penilaian Kinerja & Kesejahteraan ASN	64,501,200.00
						Pemberian penghargaan bagi PNS yang memenuhi masa kerja yang telah ditentukan	200	200	200	0	org		146,239,800.00
						Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis	1	1	1	1	Aplikasi		81,001,200.00
						Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	0	4	3	5	SK	Bid. Pengembangan & Mutasi Kepegawaian	48,300,000.00
						Penetapan sistem satu atap kenaikan pangkat	250	250	250	250	org		393,803,600.00
						Penyelesaian Penerbitan SK jabatan Fungsional	125	125	125	125	SK		172,250,000.00
						Pelaksanaan administrasi pindah tugas/mutasi pegawai dan status ASN (pindah tugas antar kab/kota/provinsi dan lembaga)	0	10	15	20	org		107,038,400.00
						Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat	0	70	0	50	org		47,975,000.00
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur						Bid. Penilaian Kinerja & Kesejahteraan ASN	
						Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki purna tugas	50	0	100	0	%		402,067,600.00
						Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI							
						Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	3	3	3	5	14 kali		39,645,000.00

							Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				1	kali		75,025,000.00
							Penyelenggaraan MTQ KORPRI				1	kali		6,750,000.00
3	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Record Data yang Diupdate	100	100	100	100	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**							
							Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)				2	dok	Bid. Pengadaan & Informasi Kepegawaian	118,899,600.00
							Rekonsiliasi Data Kepegawaian				1	dok		10,700,000.00
							Pengelolaan Tatanaskah/ Roll O Pack PNS	250	250	250	250	tata naskah		105,075,000.00
		Persentase SKPD yang melaporkan data kepegawainnya	100	100	100	100	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**							
							Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	10	10	12	10	Kartu	Bid. Pengadaan & Informasi Kepegawaian	86,475,000.00
							Penilaian Kinerja PNS				4850	AKP	Bid. Penilaian Kinerja & Kesejahteraan ASN	519,617,600.00
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	3	3	3	3	12 kali		32,500,000.00
							Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	204				dok		82,710,000.00

Tana Paser, Januari 2020

Kepala Badan,

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

LAMPIRAN 4. FORM HASIL EVALUASI KINERJA TRIWULAN

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Paser
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDdaya Manusia
Periode Pelaksanaan : Semester I Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		16	17
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
A		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		100	**289,252,700.00**	8	**58,552,362.00**	10	**28,934,000.00**		**94,283,483.00**		**84,760,154.00**	**18**	**266,529,999.00**		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Jumlah berkas surat menyurat dikirim	12	240,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	240,000.00	12	240,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12	-	3	0.00	3	0.00	3	0.00	0	0.00	9	0.00		
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output :Terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2	4,000,000.00	1	972,000.00	1	0.00	1	1,577,500.00	9	0.00	12	2,549,500.00		
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan	72	123,588,300.00	0	0.00	36	19,576,800.00	18	50,668,800.00	18	35,592,800.00	72	105,838,400.00		
5		Penyediaan alat tulis kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	12	25,297,500.00	3	0.00	3	0.00	0	18,714,025.00	0	6,554,354.00	6	25,268,379.00		
6		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	12	5,617,500.00	3	0.00	3	0.00	3	5,551,000.00	3	0.00	12	5,551,000.00		
7		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	1,570,000.00	3	0.00	3	0.00	3	1,567,000.00	3	0.00	12	1,567,000.00		
8		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	23	14,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14,498,000.00	1	14,498,000.00		
9		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	1,825,000.00	3	444,000.00	3	300,000.00	3	600,000.00	3	450,000.00	12	1,794,000.00		
10		Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat	400	4,000,000.00	0	0.00	0	0.00	200	2,000,000.00	200	2,000,000.00	400	4,000,000.00		
11		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Output : Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12	60,000,000.00	3	53,736,362.00	3	0.00	3	1,147,958.00	3	3,633,000.00	12	58,517,320.00		
12		Penataan Arsip SKPD	Output :Tersusunnya arsip BKPP dengan baik	12	48,614,400.00	3	3,400,000.00	3	9,057,200.00	3	12,457,200.00	3	21,792,000.00	12	46,706,400.00		
13		Rapat Kerja Daerah	Output :Terlaksananya Rapat kerja Daerah	12	12,198,900.00	3	3,400,000.00	3	9,057,200.00	3	12,457,200.00	3	21,792,000.00	12	46,706,400.00		
						- -							**Rata-rata capaian kinerja (%)**				
													Predikat Kinerja				

A		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		100	**96,569,000.00**	4	**10,200,000.00**	20	**15,300,000.00**		**42,640,000.00**		**21,225,000.00**	**24**	**89,365,000.00**		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pengadaan mebeleur	Output : Tersedianya Mebeleur	6	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Terpeliharanya gedung kantor	12	51,231,500.00	3	6,800,000.00	3	10,200,000.00	3	20,215,000.00	3	10,200,000.00	12	47,415,000.00		
3		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Output : Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan	1	29,800,000.00	0	3,400,000.00	1	5,100,000.00	0	11,475,000.00	0	8,100,000.00	1	28,075,000.00		
4		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	1	6,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	3,000,000.00	1	2,925,000.00	1	5,925,000.00		
5		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	6,687,500.00	0	0.00	0	0.00	9	5,170,000.00	3	0.00	12	5,170,000.00		
6		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	2,850,000.00	0	0.00	0	0.00	9	2,780,000.00	3	0.00	12	2,780,000.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		100	**97,959,400.00**	5	**26,100,000.00**	5	**0.00**		**11,275,000.00**		**20,774.00**	**10**	**37,395,774.00**		
1	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Pengambilan sumpah & pelantikan pejabat struktural	Output : Jumlah Pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural	11	70,675,000.00	1	26,100,000.00	0	0.00	0	11,275,000.00	0	0.00	1	37,375,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Pengambilan sumpah janji PNS	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti sumpah janji PNS	250	27,284,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	135	20,774.00	135	20,774.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		100	**1,071,299,700.00**	0	**96,760,000.00**	0	**22,600,000.00**		**0.00**		**0.00**	**0**	**119,360,000.00**		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pembekalan Bagi PNS Yang Akan Memasuki Purna Tugas	Output : Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pembekalan	174	30,232,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	Output : Meningkatnya pemahaman PNS Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas masing masing	73	1,041,067,100.00	1	96,760,000.00	0	22,600,000.00	1	0.00	0	0.00	2	0.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		100	**1,495,000.00**	0	**0.00**	0	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0**	**0.00**		

1	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Output : Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun	10	1,495,000.00	0	0.00	10	0.00	0	0.00			10	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**		100	**5,438,800.00**	0	**0.00**	0	**0.00**		**2,683,200.00**		**894,400.00**	**0**	**3,577,600.00**		
1	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan data Statistik Sektoral	Output : Jumlah Dokumen data statistik sektoral SKPD yang tersusun	10	5,438,800	0	0.00	0	0.00	0	2,683,200.00		894,400.00	0	3,577,600.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program perencanaan pembangunan daerah**		100	**36,307,500.00**	25	**7,005,527.00**	25	**11,250,000.00**		**9,894,400.00**		**24,301,000.00**	**50**	**52,450,927.00**		
1	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Jumlah Buku/laporan perencanaan yang tersusun	10	4,798,800.00	1	7,005,527.00	1	11,250,000.00	1	9,000,000.00		21,006,600.00	3	48,262,127.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Penyusunan RENJA SKPD	Output : Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD yang tersusun	10	4,908,700.00	0	0.00	2	0.00	2	894,400.00		1,788,800.00	4	2,683,200.00		
3		Evaluasi RENJA SKPD	Output : Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	4	26,600,000.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00		1,505,600.00	3	1,505,600.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur**		100	**1,544,014,510.00**	5	**164,631,553.00**	0	**89,135,760.00**		**94,634,334.00**		**1,096,666,582.00**	**5**	**1,445,068,229.00**		
1	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh Tim Baperjakat	Output : Jumlah penyelenggaran mutasi dan promosi sesuai kebutuhan	6	365,375,000.00	0	41,494,360.00	0	0.00		75,433,334.00	0	163,188,503.00	0	280,116,197.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	Output : Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS Daerah	108	1,092,176,110.00	12	123,137,193.00	0	89,135,760.00	4	0.00	0	871,535,479.00	16	1,083,808,432.00		
3		Pelaksanaan Ujian Dinas	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas	80	86,463,400.00	0	0.00	0	0.00	0	19,201,000.00	66	61,942,600.00	66	81,143,600.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**		100	**3,420,826,250.00**	10	**529,670,091.00**	3	**92,528,500.00**		**728,932,849.00**		**1,333,351,860.00**	**13**	**2,684,483,300.00**		

1	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Output : Terpenuhinya Aparatur Pemerintah sesuai kebutuhan	14	554,321,000.00	1	50,000,000.00	0	0.00	3	92,880,000.00		407,750,377.00	4	550,630,377.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Seleksi Penerimaan Calon PNS	Output : Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan	140	463,686,300.00	0	159,388,730.00	0	0.00	0	20,000,000.00	135	275,564,706.00	135	454,953,436.00		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Penetapan sistem satu atap kenaikan pangkat	Output : Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu	1000	172,666,100.00	0	91,420,200.00	479	9,900,000.00	0	37,091,200.00	232	23,039,000.00	711	161,450,400.00		
4	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan dan pemanfataan Sistem Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	Output : Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang tersedia	2	73,111,500.00	0	3,600,000.00	0	5,400,000.00	0	18,402,000.00	2	43,245,600.00	2	70,647,600.00		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul persetujuan BKN	Output : Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu	160	65,660,750.00	33	43,067,500.00	32	12,792,000.00	27	2,509,200.00		2,850,000.00	92	61,218,700.00		
6	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS	Output : Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	167	26,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	167	4,057,000.00	167	4,057,000.00		
7	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Output : Dokumen LHKPN yang disampaikan ke KPK	229	44,290,300.00	228	0.00	1	0.00	0	0.00	0	40,290,300.00	229	40,290,300.00		
8		Pengelolaan tatanaskah/Roll O Pack PNS	Output : Tersedianya data fisik tatanaskah kepegawaian dan file elektronik (image	1000	63,283,550.00	204	3,600,000.00	195	5,400,000.00	332	9,000,000.00	273	39,782,000.00	1004	57,782,000.00		
9		Pengelolaan,pemanfaatan dan pemeliharaan SAPK	Output : Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia	1	17,181,250.00	0	8,372,800.00	0	0.00	0	0.00	1	8,290,000.00	1	16,662,800.00		
10	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Penyelesaian Penerbitan SK jabatan Fungsional	Output : Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional yang tepat waktu	500	53,195,000.00	121	19,560,100.00	154	0.00	54	0.00	12	33,619,000.00	341	53,179,100.00		
11	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Output : Jumlah kartu tanda pengenal PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang terbit	800	25,478,500.00	179	0.00	221	0.00	269	0.00	131	20,524,900.00	800	20,524,900.00		
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Output :Jumlah Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan	10	154,232,700.00	2	24,282,000.00	0	5,400,000.00	1	26,367,200.00	4	82,607,800.00	7	138,657,000.00		
13		Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan Pangkat	Output : Jumlah PNS yang mengikuti Rapat Evaluasi Kenaikan Pangkat	120	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
14		Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS	Output : Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	81,001,200.00	1	0.00	0	8,400,000.00	0	17,699,200.00	0	45,128,600.00	1	71,227,800.00		

15		Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja PNS	Output : Jumlah SK peninjauan/SK perbaikan	12	48,300,000.00	2	11,541,000.00	2	0.00	0	0.00	7	13,116,000.00	11	24,657,000.00		
16	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Lelang Jabatan ASN	Output : Jumlah SK peninjauan/SK perbaikan	5	670,180,000.00	0	38,835,175.00	0	0.00	4	331,774,488.00	0	35,187,827.00	4	405,797,490.00		
17		Assessment PNS	Output : Jumlah PNS yang mengikuti Assesment	28	393,122,800.00	0	14,251,640.00	0	0.00	28	145,142,161.00	0	5,599,000.00	28	164,992,801.00		
18		Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Memenuhi Masa Kerja yang Telah Ditentukan	Output : Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan SLKS	600	75,108,550.00	161	14,853,000.00	393	0.00	0	12,042,400.00	0	39,488,200.00	554	66,383,600.00		
19		Fasilitasi Pengelolaan Assesment Center	Output : Tersedia dan terselenggaranya pengelolaan, Pengembangan dan fasilitasi layanan teknologi informasi Assessment Center BKPP Kab. Paser	12	224,759,800.00	3	3,600,000.00	3	45,236,500.00	3	9,000,000.00	3	161,875,700.00	12	219,712,200.00		
20	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian	Output : Jumlah kartu identitas kepegawaian yang terbit (Taspen, Karpeg, KAris, Karsu, KPE dan Konversi NIP)	42	21,618,750.00	38	19,577,046.00	0	0.00	0	0.00	0	2,040,000.00	38	21,617,046.00		
21	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN	Output : Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPP Paser, BKD Provinsi dan BKN	35	34,138,400.00	5	10,008,000.00	3	0.00	5	7,025,000.00	4	16,899,400.00	17	33,932,400.00		
22	Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Keterampilan dan Pembinaan ASN	Penilaian Kinerja PNS	Output : Jumlah SKP Yang terkumpul yang dievaluasi	4630	116,110,200.00	1141	9,614,250.00	1100	0.00	1201	0.00		3,402,500.00	3442	13,016,750.00		
23		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	Output : Jumlah dokumen laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin ASN	12	41,429,600.00	3	4,098,650.00	6	0.00	1	0.00		27,043,950.00	10	31,142,600.00		
24	Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian	Rekonsilisasi Data Kepegawaian	Output : Cakupan Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu (persen)	100	1,950,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	1,950,000.00	100	1,950,000.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
A		**Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI**		100	**121,420,000.00**	5	**0.00**	0	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0**	**0.00**		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Output : Fasilitasi kegiatan Rakerda dan Apel KORPRI gabungan	14	39,645,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia	
2		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Output : Fasilitasi kegiatan kompetensi olahraga KORPRI	1	75,025,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
3		Penyelenggaraan MTQ KORPRI	Output : Fasilitasi kegiatan MTQ KORPRI	1	6,750,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
						Rata-rata capaian kinerja (%)											
						Predikat Kinerja											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM					**6,563,162,860.00**										**4,698,230,829.00**		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM	
PREDIKAT KINERJA PROGRAM	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :	

Disusun :

Tana Paser, tanggal Januari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. S U W I T O
NIP. 19650808 199203 1 019

LAMPIRAN 5. DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIRAIH

1. **PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PERAIH PROGRES FISIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TERTINGGI TAHUN 2014**
2. **PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK TAHUN 2015 & 2016**
3. **JUARA I PERANGKAT DAERAH KATEGORI TERINOVATIF SE KABUPATEN PASER OLEH BAPPEDALITBANG**

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA

DAN TATA ARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

iundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN 6. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

LAMPIRAN 8. SK TIM